

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi nirlaba merupakan suatu kumpulan antara dua individu atau lebih yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan seperti organisasi bisnis. Organisasi nirlaba adalah organisasi dibawah naungan swasta namun bersifat mandiri dalam hal bersifat pembiayaan dan manajemennya. Organisasi ini tidak bersifat mengikat keanggotaannya dan sukarela. Organisasi nirlaba memfokuskan kinerjanya pada pelayanan publik. “Entitas nirlaba atau organisasi nirlaba adalah sebuah lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang bekerja sama dan mempunyai tujuan tertentu, entitas nirlaba tidak mengutamakan laba atau kekayaan dalam melaksanakan kegiatan yang mereka lakukan” (Nainggolan, 2012).

Karakteristik organisasi nirlaba tidak sama dengan organisasi lain, antara lain “(1) dana diperoleh dari sumbangan yang tidak mengharapkan imbalan, (2) menghasilkan barang jasa dengan tujuan utama tidak untuk mencari laba, walaupun memperoleh laba pendiri dan pemilik tidak mengambilnya, (3) hak milik entitas tidak dapat pindah tangankan, dijual, diberikan, dan, (4) kepemilikan tidak menunjukkan jumlah pembagian saat pencairan atau likuidasi” (IAI, 2017).

Pada dasarnya organisasi nirlaba tujuannya adalah untuk pelayanan pendidikan, ekonomi, spiritual, sosial, dan perorangan maupun kelompok yang bersifatnya tidak mengharapkan imbalan. Karakteristik entitas yang berbeda

dengan organisasi lain, menimbulkan transaksi yang jarang terjadi, misalnya sumbangan. “Utang dipilih sebagai modal usaha oleh beberapa entitas nirlaba walaupun ada kepemilikan di dalamnya, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan untuk pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mempengaruhi pengukuran jumlah dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Karakteristik entitas semacam ini tidak jauh berbeda dengan entitas lain pada umumnya” (IAI, 2017).

Berbagai sumber masukan dari Undang-Undang Pendidikan dan Yayasan, serta PSAK No. 45 memberikan dorongan bagi peneliti untuk mengeksplorasi bermacam – macam ketentuan yang berhubungan dengan pembuatan laporan keuangan oleh yayasan pendidikan agar sesuai acuan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK No.45). Laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba adalah pokok yang sangat penting. Tujuannya tidak lain adalah agar laporan keuangan tersebut relevan, mudah di baca dan mudah dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan riset atau penelitian tentang organisasi nirlaba, seperti yang dilakukan Fatih (2015) tentang Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Yayasan Berdasarkan PSAK 45 (studi kasus pada Yayasan Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Hasil yang diperoleh adalah yayasan

tersebut hanya mencatat sebatas penerimaan dan pengeluaran, belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman penyusunan PSAK No. 45.

Wahyu Repi, dkk (2015) meneliti tentang penerapan penyusunan laporan keuangan nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada STIKES Muhammadiyah Manado. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan keuangan organisasi yang sesuai dengan pedoman laporan keuangan nirlaba yaitu PSAK No.45. STIKES hanya mengacu pada kebutuhan yayasan yang berbentuk neraca saldo. Dan belum menilai penyusutan aset dan hanya mencatat sebagai inventaris.

Yuhaida, dkk (2013) meneliti tentang penerapan PSAK No.45 pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Assalbiyah. Husnia menggunakan Metode Miles dan Hubberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan dan merekonstruksi laporan keuangan sekolah. Hasil yang diperoleh adalah laporan keuangan LPNU Assalbiyah tidak menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang ada pada PSAK No.45. Sehingga kesimpulannya adalah laporan keuangan tersebut belum sesuai dengan PSAK No. 45.

Utomo dan Qomariah (2014) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Psak No 45 Pada Laporan Keuangan Yayasan Penolong Anak Yatim Dan Miskin Perguruan Darul Islam Di Kota Gresik Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. Hasilnya adalah Yayasan Penolong Anak Yatim dan Miskin Perguruan Darul Islam Gresik” sudah mampu menyusun laporan

keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45, sehingga akuntabilitas keuangan bisa menjadi lebih baik dan dapat dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan kepada anak – anak yatim dan miskin untuk kebutuhan dan operasional pendidikan di Perguruan Darul Islam Gresik.

Berbagai macam bentuk organisasi nirlaba yang ada di masyarakat, salah satunya adalah lembaga pendidikan atau sekolah. Sekolah merupakan lembaga yang didirikan untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sekolah sebagai lembaga non profit, memiliki kegiatan manajemen baik yang berkaitan dengan sumber daya, keuangan dan operasional. Sekolah masuk dalam kategori organisasi nirlaba, karena mempunyai karakteristik dari organisasi nirlaba khususnya pendapatan berasal dari sumbangan. Untuk itu sekolah perlu menyusun laporan keuangan yang akuntabilitas dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah berlaku, yaitu PSAK No.45.

Pengguna laporan keuangan entitas bisnis dan nirlaba tidak jauh berbeda, yaitu untuk mengetahui dan menilai jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, dan juga mengetahui cara manajer melaksanakan aspek kinerja manajer dan tanggungjawabnya. “Entitas nirlaba harus mampu mengkomunikasikan kinerjanya melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antaraunsur-unsur tersebut” (IAI, 2017).

Keterbukaan laporan keuangan sangat penting untuk kejelasan pertanggungjawaban suatu organisasi atau entitas. Bagi organisasi pendidikan sekolah kebenaran dan kejelasan suatu laporan keuangan sangat mempengaruhi

kepercayaan pemangku kepentingan khususnya donator dan wali murid. Dampak dari hilangnya kepercayaan donator dapat mengurangi pemasukan sekolah. Sedangkan hilangnya kepercayaan dari wali murid dapat menyebabkan kurangnya minat untuk bersekolah di tempat tersebut. Tidak hanya kualitas pendidik yang diutamakan. Namun, manajemen dan keuangan juga sangat berpengaruh bagi konsumen atau pelanggan.

Hingga saat ini masih banyak dijumpai laporan keuangan organisasi masih sangat sederhana dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penyampaian kepada pemangku kepentingan masih banyak kekurangan. Dapat dilihat dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, tidak sedikit organisasi nirlaba yang belum mampu menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45. masih banyak pula yang belum memahami tentang laporan keuangan yang baik dan benar. Mulai dari yayasan sosial, organisasi keagamaan hingga sekolah masih banyak ditemukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.45.

Sekolah perlu mengupayakan perolehan dana yang maksimal untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur penggunaannya, sekolah juga perlu memajemen keuangan sebagaimana mestinya . Untuk merealisasikannya akuntan atau bendahara sekolah memerlukan informasi keuangan yang akurat. Informasi keuangan yang akurat dapat diperoleh melalui penerapan akuntansi dalam sekolah. Peranan akuntansi dalam memperlancar manajemen keuangan adalah dalam fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam pengelolaan keuangan sekolah yang baik

ada dua hal yang perlu diperhatikan sekolah yaitu bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana mengupayakan informasi keuangan.

Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, salah satu dari berbagai yayasan yang tujuannya untuk memberikan pendidikan dan pengajaran juga tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah ada banyak jumlahnya. Salah satunya adalah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik yang ada di pertengahan Kota Gresik. Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang dijalankannya. Terbukti dengan adanya predikat salah satu sekolah swasta favorit di Gresik. Didukung dengan tenaga pengajar yang kompeten, fasilitas sekolah yang lengkap dan pendukung lainnya menambah perkembangan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik berjalan cukup pesat.

Tidak hanya keunggulan SDM dan manajemen yang baik, dalam hal keuangan SMP Muhammadiyah 1 Gresik seharusnya juga mengupayakan penyajian laporan keuangan yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Hingga saat ini SMPM 1 Gresik belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman penulisan laporan keuangan organisasi nirlaba, yaitu PSAK No.45. SMPM 1 Gresik hanya menyusun laporan realisasi anggaran per semester dan neraca tahunan. SMPM 1 Gresik belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45 disebabkan karena penyusunan dan penulisiannya telah diatur oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Jawa Tmur dan telah tertulis dalam Pedoman Keuangan Sekolah Muhammadiyah Jawa Timur.

Sebagai entitas nirlaba sudah seharusnya pelaporan keuangan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar sekolah dapat memahami tentang penyusunan PSAK No.45 dan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK No.45. Agar laporan keuangan yang dihasilkan andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang terkait dengan laporan keuangan dan merekonstruksi laporan keuangan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik dengan judul “Rekonstruksi Laporan Keuangan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Gresik Berdasarkan PSAK No.45”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana penerapan PSAK No.45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba di SMP Muhammadiyah 1 Gresik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaporan dan penerapan PSAK No. 45 pada laporan keuangan di SMP Muhammadiyah 1 Gresik.
- b. Merekonstruksi laporan keuangan SMP Muhammadiyah 1 berdasarkan PSAK No.45.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Organisasi Sekolah, dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan keuangan organisasi nirlaba yang benar sesuai dengan PSAK No. 45 yang ada.
- b. Bagi lingkungan akademis, diharapkan akan menjadi referensi untuk penelitian yang selanjutnya.